

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh :

NAMA : ANGGI DWI PUTRA
NOMOR POKOK : E. 1735222954
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
PERGURUAN TINGGI SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH
SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I

Suherman, Drs., M.Si.

NIDN.04-1603-6702

Pembimbing II

Edi Setiawan, S.Sos., M.Si.

NIDN.04-0606-7505

Mengetahui,

Ketua STIA Sebelas April Sumedang,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.

NIDN.04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ANGGI DWI PUTRA
NOMOR POKOK : 1735222954
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Agustus 2021
Pukul : 08.00 - selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si ()

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()

Pembimbing I : Suherman, Drs., M.Si ()

Pembimbing II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si ()

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD
PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada
ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi :

Penguji I : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si

()

Penguji II : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si

()

Penguji III : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si

()



STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD
PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada
ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi :

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Tanda Tangan
1	Edi Setiawan, S.Sos., M.Si	Tidak Ada Materi Yang Diperbaiki	
2	Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si	Tidak Ada Materi Yang Diperbaiki	
3	Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si	Memperbaiki Jadwal Penelitian di BAB III dan Memperbaiki Daftar Pustaka	

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Proposal Penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Maret 2021
Yang membuat pernyataan,

ANGGI DWI PUTRA

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD
PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : ANGGI DWI PUTRA
NOMOR POKOK : E.1735222954
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

160 halaman, 5 Bab, 55 tabel, 4 gambar, 8 lampiran

Daftar Pustaka: 32 Buku dan 5 Dokumen

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran, faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan tersebut Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, dengan variabel mandiri yaitu implementasi kebijakan. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Kepala UPTD Wilayah Sumedang Kota, Kepala Pasukan Damkar, Ketua Regu Damkar, Pasukan Damkar. Dalam menganalisis data, menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, *Conclusion Drawing/ Verification*, dan Trianggulasi serta Validasi Data.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang kemudian dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dapat dikatakan cukup baik, meskipun ada beberapa indikator yang masih memerlukan peningkatan serta dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Saran yang disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan atau penerapan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran antara lain menyelenggarakan kegiatan khusus secara berkala untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan pasukan pemadam kebakaran baik dari pihak UPTD maupun dari masyarakat yang dalam hal ini satuan relawan kebakaran.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARD POLICY
FOR FIRE DISASTER MANAGEMENT IN SUMEDANG REGION FIRE
EXTINGUISHERS, SUMEDANG DISTRICT**

Arranged by:

NAME : ANGGI DWI PUTRA
MAIN NUMBER : E.1735222954
STUDY PROGRAM : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

160 pages, 5 chapters, 55 tables, 4 pictures, 8 attachments

Bibliography: 32 Books and 5 Documents

This study aims to analyze the Implementation of the Policy on Minimum Service Standards for Fire Disaster Management, the factors that hamper the success of the policy implementation as well as efforts to overcome the obstacles in the Implementation of the Policy in the Fire Fighting UPTD of Sumedang Region, Sumedang District.

The method used in the preparation of this thesis is a Qualitative Research Method, with an independent variable, namely policy implementation. The sampling technique used was Purposive Sampling, informants in this study were the Head of Operational Control, the Head of the Sumedang City UPTD, the Head of the Damkar Squad, the Head of the Damkar Squad, the Damkar Squad. In analyzing data, using Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing / Verification, and Triangulation and Data Validation.

Based on the results of interviews and observations which were then performed data analysis, it was concluded that the Implementation of the Policy on Minimum Service Standards for Fire Disaster Management in the Sumedang Fire Fighting Unit UPTD Sumedang City can be said to be quite good, although there are some indicators that still need improvement and support from all parties, both from the community and the government.

Suggestions delivered in order to improve the implementation or implementation of the Minimum Service Standards for Fire Disaster include organizing periodic special activities to improve the capabilities, knowledge and skills of firefighters both from the UPTD and from the community in this case the fire volunteer unit.

Keywords: Policy Implementation, Minimum Service Standard

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum, wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaitan salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG”** dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana sosial pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yth. H. Yuyun Hidayat, Drs., Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.sos., M.Si selaku Ketua STIA Sebelas April Sumedang
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha S.Sos., M.Si Selaku Pembantu Ketua I STIA Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, M.Pd., Selaku pembantu Ketua II STIA Sebelas April Sumedang.

5. Yth. Ibu Irma Hermawati, S.sos., M.Si selaku pembantu Ketua III STIA Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Suherman Drs., M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi I.
7. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II.
8. Yth. Seluruh Bapak/Ibu dosen STIA Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Seluruh staf Tata Usaha STIA Sebelas April Sumedang.
10. Yth. Bapak Kadis dan seluruh pegawai UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang, Kabupaten Sumedang yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis.
11. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Tatang Sutardi dan ibunda tersayang Eni Sukaeni serta Angga Nugraha selaku Kakak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas A dan D Angkatan 2017 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
13. Teman-teman terdekat yaitu Usep, Ama, Ivan, Ikhsan, Apip, Davi, Rio, Dian
14. Nida Hana Djulianti, selaku kekasih tercinta yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Administrasi.

Sumedang, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUANi

LEMBAR PENGESAHANii

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN....iii

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL PENELITIANiv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR LAMPIRANxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian1

B. Fokus Permasalahan.....8

C. Tujuan penelitian.....9

D. Kegunaan penelitian.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara.....11

2. Unsur-unsur Administrasi Negara.....12

3. Ciri-ciri Administrasi Negara.....14

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara.....15

5. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian.....16

B. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	19
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	20
3. Urgensi Kebijakan Publik	22
4. Faktor yang mempengaruhi kebijakan public	23
5. Kerangka kerja kebijakan public.....	24
C. Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	26
2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan.....	29
3. model Implementasi Kebijakan.....	31
4. dimensi implementasi kebijakan	32
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	35
6. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	40
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	43
E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	
1. Kerangka Pemikiran.....	48
2. Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	51

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	54
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	
1. Penentuan Sasaran Penelitian.....	56
2. Informan Penelitian	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Prosedur Pengolahan Data	63
E. Jadwal dan Lokasi Penelitian	65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran umum obyek penelitian	66
---	----

1. Tugas pokok dan fungsi UPTD pemadam kebakaran wilayah sumedang kota pada bidang penanggulangan bencana kebakaran kabupaten sumedang.....	66
2. Struktur organisasi UPTD Pemadam kebakaran wilayah sumedang kota pada bidang penanggulangan bencana kebakaran kabupaten sumedang.....	67
3. Visi Misi UPTD pemadam kebakaran wilayah sumedang kota pada bidang penanggulangan bencana kebakaran kabupaten sumedang	74
B. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran pada UPTD pemadam kebakaran wilayah sumedang kota kabupaten sumedang.....	80
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	117
D. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	141

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	163
B. SARAN	167

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	52
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	57
Tabel 3.2	Data Informan	58
Tabel 3.3	Umur Data Pegawai.	58
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	60
Tabel 4.1	Keadan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan	78
Tabel 4.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	79
Tabel 4.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	79
Tabel 4.5	Hasil Wawancara Item 1	83
Tabel 4.6	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Kejelasan Komunikasi	84
Tabel 4.7	Hasil Wawancara Item 2	86
Tabel 4.8	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Sosialisasi Tujuan Kebijakan.....	87
Tabel 4.9	Hasil Wawancara Item 3	89
Tabel 4.10	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Staf Atau Pegawai.....	90
Tabel 4.11	Hasil Wawancara Item 4	91
Tabel 4.12	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Informasi.....	92
Tabel 4.13	Hasil Wawancara Item 5	94
Tabel 4.14	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Wewenang.....	96

Tabel 4.15	Hasil Wawancara Item 6	97
Tabel 4.16	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Sarana Prasarana	98
Tabel 4.17	Hasil Wawancara Item 7	100
Tabel 4.18	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Disiplin.....	101
Tabel 4.19	Hasil Wawancara Item 8	103
Tabel 4.20	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Kejujuran.....	104
Tabel 4.21	Hasil Wawancara Item 9	105
Tabel 4.22	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Standar Prosedur	106
Tabel 4.23	Hasil Wawancara Item 10	108
Tabel 4.24	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Jabatan Menejerial	109
Tabel 4.25	Hasil Wawancara Item 11	110
Tabel 4.26	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Hubungan Kerja	111
Tabel 4.27	Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ..	113
Tabel 4.28	Hasil Wawancara Item 12 Dan 13	119
Tabel 4.29	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pemahaman Isi Kebijakan	120
Tabel 4.30	Hasil Wawancra Item 14.....	122
Tabel 4.31	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Hambatan Sumber Daya	123
Tabel 4.32	Hasil Wawancara Item 15 Dan 16	125
Tabel 4.33	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Ketidakjelasan Informasi	126
Tabel 4.34	Hasil Wawancara Item 17	128

Tabel 4.35	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Hambatan Penyelenggara Program.....	129
Tabel 4.36	Hasil Wawancara Item 18	131
Tabel 4.37	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Hambatan Sasaran Program	132
Tabel 4.38	Hasil Wawancara Item 19 Dan 20	134
Tabel 4.39	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pembagian Tugas Yang Tidak Jelas	135
Tabel 4.40	Rekapitulasi Faktor-Faktor Hambatan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	137
Tabel 4.41	Hasil Wawancara Item 21 Dan 22	143
Tabel 4.42	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pemahaman Isi Kebijakan	144
Tabel 4.43	Hasil Wawancara Item 23	145
Tabel 4.44	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Sumber Daya Pembantu Memadai	146
Tabel 4.45	Hasil Wawancara Item 24 Dan 25	148
Tabel 4.46	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Kejelasan Informasi ...	149
Tabel 4.47	Hasil Wawancara Item 26	151
Tabel 4.48	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Penyelenggara Program	152
Tabel 4.49	Hasil Wawancara Item 27	154
Tabel 4.50	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Sasaran Program	154
Tabel 4.51	Hasil Wawancara 28 dan 29.....	156

Tabel 4.52	Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pembagian Tugas Yang Jelas Dan Tanggung Jawab.....	157
Tabel 4.53	Rekapitulasi Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang	160



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	50
Gambar 3.1	Desain Penelitian.....	56
Gambar 3.2	Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	64
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bidang Damkar Kabupaten Sumedang	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor: 0032/SK/D-STIA/UN/K/I/2021 tentang penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi Tahun Akademik 2017/2018
- Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 5 Pedoman Observasi
- Lampiran 6 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dengan dampak kerugian harta benda, terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Kebakaran dapat dibagi berdasarkan penyebabnya yaitu kebakaran tipe A, tipe B, dan tipe C. kebakaran tipe A disebabkan bahan padat seperti kertas, kayu, yang cara pemadamannya dapat menggunakan pasir, air, dan karung goni yang dicelupkan kedalam air. Kebakaran tipe B disebabkan bahan cair seperti bensin, solar, spirtus, yang dapat dipadamkan menggunakan pasir tepung pemadam kering, dan busa. Tidak disarankan memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair menggunakan air karena beresiko kebakaran akan lebih menyebar. Kebakaran tipe C disebabkan oleh listrik yang dapat menimbulkan panas seperti konsleting atau arus pendek yang mengenai bahan yang mudah terbakar. Cara pemadaman harus menghentikan arus listrik yang tersambung ke lokasi kebakaran. Adapun peristiwa bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang berdasarkan data dari Bidang Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Sumedang yaitu terjadi 231

Tahun	Bulan Kejadian	Jumlah
2019	Januari	12
	Februari	3

Maret	9
April	15
Mei	10
Juni	12
Juli	24
Agustus	21
September	26
Oktober	89
November	10
Jumlah	231

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah Kebakaran yang terjadi di kabupaten Sumedang yang terbesar pada bulan oktober yaitu 35% sedangkan yang terendah pada bulan februari yaitu 1%. Bencana kebakaran tersebut ada yang ditangani oleh UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang karena terjadi di wilayah kota Kabupaten Sumedang. Kebakaran yang terjadi sering terjadi yaitu kebakaran lahan. Dilihat dari hal tersebut tentu perlu sekali adanya standar pelayanan minimal yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan di delegasikan kepada Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang kemudian dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang yang merupakan salah

satu pelaksana teknis penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sumedang.

Bidang Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran agar lebih fokus dan terstruktur. Adapun salah satu UPTD tersebut yaitu UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab untuk wilayah Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ganeas.

UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugasnya memiliki standar pelayanan minimal yang menjadi acuan atau panduan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ialah agar adanya layanan atau respon cepat (*Response Time*) dalam penanggulangan bencana kebakaran baik dalam pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran ataupun dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan tercipta rasa aman, tentram, dan nyaman di masyarakat.

Standar pelayanan minimal atau mutu pelayanan dasar harus selalu diterapkan pada setiap UPTD Pemadam Kebakaran maupun jajaran pemerintah, hal tersebut memiliki tujuan antara lain: 1) masyarakat akan terjamin menerima

suatu pelayanan publik dalam hal ini yaitu penanggulangan kebakaran; 2) Standar pelayanan minimal sebagai alat bagi UPTD Pemadam Kebakaran untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar; 3) Standar pelayanan minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas UPTD Pemadam Kebakaran terhadap masyarakat; dan 4) Dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Mutu standar pelayanan minimal yang diterapkan pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang meliputi: 1) Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi namun waktu tersebut bisa saja melenceng dikarenakan kondisi di lapangan tidak menentu, dan evakuasi; 2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; 3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi; 4) Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia; 5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran. Dari semua standar tersebut dapat dikatakan baik apabila kondisi di lapangan mendukung, contohnya ketika terjadi kebakaran di lokasi dekat dengan kantor pemadam maka standar pelayanan akan berjalan dengan baik, beda halnya dengan kebakaran yang terjadi jauh dari lokasi Kantor Pemadam kebakaran maka standar pelayanan tidak akan berjalan dengan baik.

Implementasi dari standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana kebakaran yang dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang yaitu melalui langkah-langkah kegiatan seperti: 1) Layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran; 2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; 3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi; 4) layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebarar; dan 5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Hal tersebut harus dijalankan dan diterapkan dengan baik, karena dalam hal ini implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar diaplikasikan di lapangan dan berhasil menghasilkan keluaran seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penangulungan bencana kebakaran idealnya memenuhi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu sosialisasi, dalam hal ini pelaksana dalam implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran harus secara rutin melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang agar dalam implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran dapat terlaksana dengan optimal. Kedua, kepemimpinan pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang juga menjadi hal yang penting agar implementasi tersebut terlaksana dengan ideal. Sikap kepemimpinan pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang tidak boleh

semena-mena atau otoriter, tetapi harus kuat di dalam sisi visi, kompetensi, dan komitmennya dalam pengimplementasian standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran. Dalam konteks implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran pemimpin diharapkan menjadi penggerak utama dalam mendorong dan memotivasi pelaksana standar pelayanan minimal tersebut. Ketiga, pelaksana harus memahami setiap tahapan dan konsisten dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran tersebut. Dan yang keempat, perubahan paradigma masyarakat dalam ikut serta dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran sehingga semakin banyaknya relawan kebakaran dari masyarakat yang ikut serta dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penerapan standar pelayanan minimal memiliki dampak yang nyata dengan adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran, kelompok sasaran yang paling utama dalam standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran adalah masyarakat Kabupaten Sumedang. Sehingga masyarakat merasakan aman, tentram dan nyaman dalam proses penanggulangan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi jika terjadi bencana kebakaran.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di UPTD Pemadam Kebakaran

Wilayah Sumedang Kota. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab pegawai pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang terkait dengan standar prosedur yang harus dilaksanakan dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran. Sehingga implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran kurang optimal. Hal tersebut dapat diketahui pada wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumedang. Juga dilihat dari komunikasi yang kurang baik antara petugas lapangan dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran yang telah ditetapkan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta kurangnya pengadaan peralatan perlindungan dan pembangunan akses kebakaran. Hal ini dilihat dari jumlah pengadaan mobil pemadam yang seharusnya 2 unit di satu UPTD tetapi hanya tersedia 1 unit. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Sehingga dapat terlihat hambatan dalam efektifitas pelaksanaan atau implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sumedang.

3. Belum terjalinnya hubungan kerja yang baik antar pegawai. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pasukan Pemadaman pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Serta dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang belum dijalankan dengan baik oleh setiap pegawai dalam kerjasama tim pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH SUMEDANG KOTA KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan setelah melakukan observasi awal di UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, maka yang menjadi fokus permasalahannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?

3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Kota Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Kota Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan peneliti dalam menghadapi masalah yang ada. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan atau aparat yang berwenang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Perkataan “administrasi” dari bahasa Yunani *administrare* yang bermakna melayani, membantu, dan memenuhi. Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary English*, Silalahi (Anggara, 2016: 46) kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) *to direct* (menggerakan).

Adapun pengertian Administrasi menurut para ahli yaitu The Liang Gie (Anggara, 2016: 21) bahwa: “Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”.

Atmosudirjo (Syafiie, 2015: 4) mengemukakan pendapatnya mengenai hakekat administrasi bahwa :

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam

masyarakat, ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Siagian (Anggara, 2016: 21) mendefinisikan administrasi sebagai: “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan kerjasama, dan kemudian membagi tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai suatu kegiatan yang dituju/dicapai.

2. Unsur-unsur Administrasi

Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Dari beberapa aspek ditemukan adanya dua klasifikasi unsur administrasi yaitu unsur yang bersifat mutlak dan unsur yang bersifat umum.

Kemudian ada beberapa dimensi atau unsur-unsur dari administrasi menurut beberapa ahli yang harus dipahami, Thoha (2016: 92) mengemukakan ada delapan unsur administrasi diantaranya:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tatausaha

8. Perwakilan atau Hubungan Masyarakat

Sedangkan Siagian (2018: 76) mengemukakan bahwa unsur administrasi terdiri dari manajemen, *leadership*, pengambilan keputusan, *human relationship*, manusia dan sarana kerja. Sedangkan menurut Anggara (2016: 29) unsur administrasi terdiri dari:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata Usaha
8. Hubungan Masyarakat

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai unsur-unsur administrasi, maka Silalahi (2016: 88) menyimpulkan unsur-unsur administrasi atau dimensi administrasi sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Komunikasi atau hubungan manusia

Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai unsur-unsur administrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang saling terkait. Dimana administrasi merupakan proses pengaturan atau upaya yang dilakukan didalam organisasi yang didalamnya terdiri dari beberapa orang yang melakukan kerja sama guna mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

3. Pengertian Administrasi Negara

Dimensi administrasi negara merupakan sesuatu yang kompleks dan mempunyai kekayaan perspektif yang pada dasarnya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nigro (Islamy, 2016: 1) mengemukakan pendapatnya bahwa “Administrasi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan negara dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik”.

Selanjutnya Iskandar (2018: 54) memberikan pengertian administrasi negara sebagai “Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha pencapaian tujuan negara”. Sebagai suatu proses politik, administrasi negara meliputi seluruh rangkaian mulia saat menentukan tujuan sampai kepada penyelenggaraan pencapaian tujuan tersebut.

Selanjutnya Waldo (Syafiie, 2017: 33) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi negara, sebagai berikut : “Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, administrasi negara dibutuhkan dalam sebuah sistem pemerintahan, baik kerajaan, totaliter, sosialis, parlementer, demokrasi, dan

sebagainya untuk mencapai tujuan agar para pegawai yang berada di dalamnya dapat bersifat netral dalam melayani masyarakat sebagai fungsi tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dari rumusan administrasi negara di atas, dapat ditemukan dan dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. LAN RI (2016: 10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem ruang lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut.

1. Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.
2. Organisasi pemerintahan negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan sering disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintahan), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
3. Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan.
4. Sumber daya aparatur negara. Sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
5. Sistem dan proses kebijakan negara. Sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara.
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara. Negara eksis pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut.

7. Hukum administrasi negara. Hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu sama lain dan karya masing-masing lembaga serta tata cara menghasilkannya. Dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif, tertib dan legitimate.

5. Kaitan Administrasi Negara Dengan Implementasi Kebijakan

Administrasi publik (public administration) yang telah lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dibuat administrasi publik yang erat kaitannya dengan proses politik atau birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan negara. Oleh karena itu menurut LAN RI (2016: 10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin, administrasi memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan karena dilihat dari beberapa pokok sebagai berikut.

1. Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara.
2. Organisasi pemerintahan negara.
3. Manajemen birokrasi pemerintahan negara.
4. Sumber daya aparatur negara.
5. Sistem dan proses kebijakan negara.
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara.
7. Hukum administrasi negara.

Kasim juga mengemukakan (Iskandar, 2016: 138-139), administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkatan implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik untuk mencapainya tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi negara mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan administrasi yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan rumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), serta pengawasan penelitian hasil pengawasan kebijakan tersebut (*policy evaluation*). Menurut Iskandar (2016: 142) “Administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara”. Perkembangan administrasi negara bersifat sangat dinamis dan selalu ditantang oleh perusahaan-perusahaan. Perubahan tersebut antara lain terlihat dari model analisis yang umumnya dikenal dengan paradigma.

Dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran administrasi negara menunjukkan alur pikir baru yang ditunjang dengan seperangkat teori sehingga melahirkan paradigma baru dalam dunia administrasi negara. Paradigma baru yang memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintah akan barang-barang *public good* tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur dari pada administrasi ialah: (1) Dua orang manusia atau lebih, (2) Tujuan, (3) Tugas yang hendak dilaksanakan, dan (4) Peralatan dan perlengkapan.

Dari uraian diatas dapat dilihat mengenai bagaimana hubungan antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara, yang pada prinsipnya menurut Tachjan (2017: 21), dapat dilihat dari fungsi-fungsi berikut ini:

1. Tingkat perumusan haluan negara
Tingkat disini menunjukkan kelembagaannya sedangkan makna perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan dengan diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan (yang harus diikuti oleh pemerintah).
 - b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum.
 - c. Secara penuh memegang *political authority*.
2. Tingkat pelaksanaan haluan negara
Dalam pengertian administrasi negara, tingkat pelaksanaan haluan negara sering disebut sebagai tingkat administrasi.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa memang terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik serta keduanya dengan politik, karena setiap kehendak politik dapat mendesak masuk dalam kebijakan negara yang di gariskan, sedangkan pihak lain tingkat pelaksanaan kebijakn yaitu birokrakrasi sebagai bagian dari administrasi publik, juga dapat mendesak aspiciasinya dalam penyusunan administrasi negara.

Para ahli administrasi publik tidak secara tradisional mengartikan “*public administration*”, semata-mata hanya bersipat kelembagaan misalnya negara, tetapi telah meluas dalam dimensi hubungan antara lembaga dalam arti lembaga dengan kepentingan publik (*publik interest*).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dalam Administrasi Negara yang tidak terlepas kebijakan publik terkait dengan variabel penelitian, yaitu implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana

kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang sebagai suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan nyaman.

B. Hakekat Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* (Bahasa Inggris), yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kata *policy* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh para ilmuwan masih menunjukkan adanya keanekaragaman pengertian kebijakan.

Administrasi negara dewasa ini telah mempunyai arti lebih sekedar pengertiannya yang tradisional. Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu bidang kajian yang menjadi perhatian utama dari administrasi negara adalah kebijakan publik.

Menurut Iskandar (2018: 162) mengatakan bahwa:

Kebijakan publik amat penting bagi administrasi negara, karena selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh, untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan publik dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Seperti halnya definisi kebijakan (*policy*), maka kebijakan pemerintah (*public policy*) pun tidak hanya satu. Dalam kepustakaan ilmu kebijakan politik

dapat kita temukan definisi kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta pelaku negara pada umumnya.

Menurut Bauer (1968) yang dikutip Dunn (2016: 2) mengemukakan bahwa:

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Menurut Singadilaga (2016: 72) yang dikutip Iskandar (2018: 167) mengemukakan bahwa "Kebijakan publik yaitu keputusan sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu".

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1981: 44) yang dikutip Thoha (2015: 62) mengatakan bahwa: "*Public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan". Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari *kebijakan publik* tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena

itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2016: 32-34) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

3. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Dye dalam Wahab (2015: 14) sebagai berikut.

Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Menurut Wahab dalam Suharno (2015: 16-19) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable)

maupun sebagai variable independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2015: 52) “Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan”. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2015: 52-52) adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal

yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

5. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2015: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- A. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- B. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- C. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakannakan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- D. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitastersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- E. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- F. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

C. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan

Bencana Kebakaran

1. Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran

Banyaknya peristiwa bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang dan juga luasnya daerah di Kabupaten Sumedang dapat menjadi potensi terjadinya bencana kebakaran menjadikan Pemerintah untuk membuat kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran demi terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan nyaman.

UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan standar pelayanan minimal yang menjadi acuan atau panduan agar dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang terciptanya layanan atau respon cepat (*Response Time*) baik dalam pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran ataupun dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Selain itu terdapat tujuan dari pembentukan kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dalam hal ini yaitu penanggulangan kebakaran.
2. Standar pelayanan minimal sebagai alat bagi UPTD Pemadam Kebakaran dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar.
3. Standar pelayanan minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas UPTD Pemadam Kebakaran terhadap masyarakat.
4. Dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi.
2. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satiakar, dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas terkait.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik dan mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut

karena tidak dilaksanakan. Menurut Gordon (Pasolong, 2017: 58) “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. Implementasi sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan, karena keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dari tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain implementasi kebijakan adalah perwujudan secara nyata dari kebijakan yang telah diformulasikan agar memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.

Secara umum istilah implementasi memiliki pengertian menurut ahli yaitu, menurut Wahab (2015: 59) menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan”. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selanjutnya Udoji (Wahab, 2015: 59) mengatakan bahwa :

The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets

unless they are implemented (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas,

Winarno (2015: 29) mengemukakan bahwa:

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Selanjutnya Wahab (2017: 64) memberikan pengertian sebagai berikut

"Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden".

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis

terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan sesuatu hal yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan dan untuk mencapai tujuan dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya hingga pemerintah yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Suatu proses implementasi kebijakan merupakan kebijakan publik.

Kegiatan dari suatu kelompok aksi yang ditujukan untuk mempercepat atau memperlambat (menghambat) pelaksanaan suatu kebijakan tertentu menjadi bagian dari proses implementasi, dan bukan dari implementasi itu sendiri.

3. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Edward III (2016: 10-11) mengungkapkan bahwa “Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi”. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Wahab (2017: 45) meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat disadari dengan cepat.

Van Meter dan Vanhorn (2015: 471) menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

1. Kompetisi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksanaan keputusan”.

Dari pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam implementasi adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi

sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Rencana merupakan 20% keberhasilan, implementasi merupakan 60% sisanya, 20% sisanya merupakan bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul dilapangan. Berikut ada beberapa model implementasi kebijakan menurut Nugroho (2014: 665) yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn
Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.
2. Model Mazmanian dan Sabatier
Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi.
3. Model Hoodwood dan Gunn
Model ketiga adalah model Brian W. Hoodwood dan Lewis A. Gun. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan. Kebijakan ini cukup sulit diimplementasikan karena menggunakan asumsi negara

kesejahteraan yang berarti mengendalikan negara memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menyongkong sistem jaminan sosial tersebut. Syarat ketiga adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.

4. Model Goggin, Bowman dan Lester
Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai communication model untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai generasi ketiga model implementasi kebijakan. Goggin dkk bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
5. Model Grindle
Model kelima adalah Marilee S. Grindle. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.
6. Model Elmore dkk
Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah.
7. Model Edward
Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structure.
8. Model Nakamura dan Smallwood
Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi. Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai environments influencing implementation.
9. Model Jaringan
Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi di antara para aktor di dalam jaringan tersebut yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan direksi-direksi yang diharakan menjadi bagian penting di dalamnya.

5. Dimensi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan diharuskan memiliki faktor yang akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edward III (Mulyadi, 2018: 68) terdapat empat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Mulyadi (2018: 67) merupakan “Suatu proses interaksi dengan suatu stimulus (rangsangan) yang memperoleh suatu arti tertentu dijawab oleh orang lain (respon) secara lisan, tertulis maupun dengan abstrak”. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dan dalam komunikasi suatu kebijakan yang baik juga terdapat indikator penting yaitu kejelasan komunikasi dan sosialisasi tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber Daya menurut Parker (2015: 78) merupakan “Suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri”. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja. Oleh karena itu sumber daya harus di dukung oleh beberapa indikator penting yaitu staff atau pegawai, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III (Widodo, 2016: 88) adalah “Suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk mewujudkan serta melakukan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh”. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Maka dalam proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sehingga agar terjadi disposisi yang baik harus memiliki dua indikator yaitu disiplin dan kejujuran.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Weber (2015: 56) adalah “Suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai”. Yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedurs* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan serta menimbulkan prosedur yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas birokrasi yang tidak fleksibel. Maka dalam struktur birokrasi yang baik harus memiliki indikator yaitu standar prosedur, jabatan manajerial dan hubungan kerja.

6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (2016: 135-138) implementasi kebijakan mempunyai beberapa hambatan yang harus diperhatikan untuk mengimplementasikan kebijakan, pengaruh tersebut dapat menjadi hambatan implementasi kebijakan yaitu:

- a. Isi Kebijakan
- b. Informasi
- c. Dukungan
- d. Pembagian Potensi

Adapun penjelasan dari faktor penghambat implementasi kebijakan diatas yaitu:

a. Isi kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi, Sunggono (2016: 135-138) mengemukakan “Isi kebijakan merupakan salah satu hal yang menjadi acuan dalam berjalannya implementasi kebijakan”. Namun dalam implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan isi kebijakan memiliki beberapa permasalahan diantaranya, yaitu:

1. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan akan dapat juga menunjukkan kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
4. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan menjadi suatu hambatan untuk melaksanakan implementasi kebijakan oleh pelaku kebijakan. Hal tersebut juga berkaitan dengan indikator dalam isi kebijakan yaitu pemahaman isi kebijakan, manfaat kebijakan dan sumber daya.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Adapun beberapa pengertian informasi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli, diantaranya:

Menurut Rommey dan Steinbart (2015: 20) mengemukakan bahwa “Informasi adalah data yang sudah diproses dan diorganisasikan untuk memberikan arti bagi pengguna”. Senada dengan Gelinis & Dull (2012: 18) mengemukakan bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk formulir yang berguna dalam kegiatan pembuatan keputusan.

Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan berhubungan dengan informasi pemerintah, yakni menetapkan aturan dimana penyedia informasi pribadi dan media beroperasi. Dari penjelasan ini bahwa informasi memiliki beberapa tipe yaitu informasi sebagai sumber daya, komoditas, persepsi pola, wadah berbagai kemungkinan yang ada, agen dan kekuatan konstitusi masyarakat. Masing-masing tipe ini memiliki kegunaan dalam analisis kebijakan. Berbagai tipe ini berguna untuk berbagai tahap menganalisa bagian tertentu dari kebijakan pada saat pemberian informasi.

Dalam implementasi kebijakan informasi memiliki dua bentuk informasi yang dikemukakan menurut Edward III (Agustino, 2017: 158-159) yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
2. Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Kecenderungan untuk mengaburkan informasi atas kepentingan pribadi tersebut juga berkaitan dengan indikator faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan dalam dimensi informasi yaitu ketidakjelasan informasi dan sasaran sosialisasi.

c. Dukungan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu harus adanya dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan, diantaranya:

✿ Menurut Chaplin (2017: 17) mengemukakan bahwa “Dukungan adalah pemberian dorongan, motivasi atau semangat serta nasehat kepada orang lain yang sedang di dalam situasi membuat keputusan”.

Sedangkan menurut Kuntjoro (2015: 66) mengemukakan bahwa dukungan adalah:

Segala bentuk informasi verbal ataupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku di berikan oleh sekelompok orang yang dekat dan akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya. Atau dalam bentuk lain juga bias berupa kehadiran ataupun segala sesuatu hal yang dapat memberikan keuntungan emosional yang berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Contoh bentuk dukungan adalah kepedulian, keberadaan, kesediaan, serta sikap menghargai.

Dari pendapat kedua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan merupakan bentuk dorongan, semangat, kepedulian, kesediaan didalam suatu lingkungan, sehingga segala sesuatu yang diberikan memberikan keuntungan yang berpengaruh pada tingkah laku penerima. Sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dalam dukungan pelaksanaan kebijakan ini terdapat indikator penting yaitu penyelenggara program dan sasaran program.

d. Pembagian potensi

Menurut Sunggono (2016: 149) mengemukakan bahwa “Pembagian tugas merupakan keahlian yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan”. Oleh karena itu pembagian potensi merupakan Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik menurut Sunggono (2016: 144-135-138) diantaranya:

1. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungan orang bertindak dengan jala melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama llain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Hal tersebut juga dapat dilihat dari indikator dalam pembagian tugas yaitu pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab.

7. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (2016: 135-138) dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan terdapat upaya untuk mengatasinya. Agar suatu kebijakan menjadi efektif dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh

sarana-sarana lainnya. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, yang diantaranya sebagai berikut.

- a. Isi Kebijakan
- b. Informasi
- c. Dukungan
- d. Pembagian Potensi

Adapun penjelasan dari setiap dimensi diatas adalah sebagai berikut.

1. Isi Kebijakan

Upaya dalam mengatasi hambatan tentang isi kebijakan bahwa isi kebijakan perlu adanya beberapa faktor pendukung untuk melihat keberhasilan suatu program yang akan di implementasikan yaitu, kepetingan dari isi kebijakan program tersebut karena suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. jenis dan manfaat dari kebijakan tersebut yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan implementasi kebijakan, selain itu juga kebijakan yang dijalankan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Dalam isi kebijakan tersebut juga terdapat indikator penting yaitu pemahaman isi kebijakan, manfaat kebijakan dan sumber daya.

2. Informasi

Dalam mengatasi hambatan informasi cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan tindakan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan menghilangkan pilihan dari multi interpretasi

atau penafsiran informasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. Hal tersebut juga berkaitan dengan indikator dalam informasi yaitu ketidak jelasan informasi dan sasaran sosialisasi.

3. Dukungan

Proses implementasi tentu harus adanya dukungan untuk mengatasi hambatan diatas, alah satuunya yaitu Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturn hukum. Apabila suatu peratutran perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini ada beberapa tahap untuk meendukung implementasi kebijakan menurut Tachjan (2017: 35), diantaranya adalah:

1. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
2. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengwasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dukungan tersebut memiliki indikator dalam upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan yaitu penyelenggara program dan sasaran program.

4. Pembagian potensi

Dalam megatasi hambatan ini, adapun upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu daam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terpapar dengan baik. Pelaksanaan kebijakan juga harus di dukung

oleh sumber daya yang baik dan pembagian tugas yang merata serta menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pelaksana program agar proses pelaksanaan implementasi ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan keberlakuan hukum, maka agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian empat unsur. Sunggono (2016: 57-58) mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (Formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan atau menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Serta mengacu pada indikator dalam pembagian potensi yaitu pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan skripsi. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk deskripsi dibawah ini.

Penelitian pertama, yang disusun oleh Riswandi (2017) dengan judul ini Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang menghasilkan penelitian sebagai berikut, menggambarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, permasalahan mengenai sumber mata air masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pengembangan sistem penyediaan air minum. Implementasi kebijakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang melalui Kepala Bidang Cipta Karya secara kelembagaan, melakukan desentralisasi kewenangan kepada aparaturnya, dalam hal ini Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya hanya membuat kebijakan yang sifatnya umum yang kemudian ditindak lanjuti secara teknis oleh pegawai/aparatur sehingga ada keleluasaan bagi pegawai/aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dalam hal ini fungsi pengawasan tetap oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten melalui Kepala Bidang Cipta Karya untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kedudukan, tupoksi dan uraian tugas. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilainya dilakukan pada kondisi yang alamiah, teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling, yaitu tehnik pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan serta pegawai yang menangani air minum/air bersih.

Selanjutnya pada penelitian kedua yang disusun oleh Wiguna (2017) dengan judul Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Kebakaraan Kabupaten Bandung menghasilkan penelitian sebagai berikut, Dinas Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana kebakaran dan merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode ini juga menggunakan pendekatan *kualitatif* yakni suatu pendekatan yang tidak memerlukan suatu perhitungan namun berdasarkan suatu kualitas. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum target capaian indikator standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 tahun 2012 sampai saat ini belum tercapai dikarenakan dari banyaknya kejadian kebakaran yang cenderung meningkat dengan kompleksitas yang semakin sulit di Kabupaten Bandung, serta keterjangkauan wilayah yang tersebar menyulitkan untuk penanggulangannya, disamping itu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dalam bidang pemadam kebakaran, kurangnya simulasi dan gladi penanggulangan kebakaran yang seharusnya dilaksanakan secara rutin dan terprogram, realitasnya tidak diimbangi dengan kemampuan Dinas Kebakaran yang hanya memiliki 3 pos wilayah manajemen kebakaran yaitu WMK Soreang, WMK Ciparay, dan WMK Cicalengka, mobil pemadam kebakaran yang hanya berjumlah 8 unit dan kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang saat ini hanya memiliki 116 orang, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran seperti selang damkar, nozzle damkar, APD (alat pelindung diri) petugas, pompa portable damkar, dan peralatan rescue penyelamatan lainnya.

Dalam penelitian ketiga, yang disusun oleh Maksimilianus Maris Jupir (2013) Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Kabupaten Manggarai Barat) menghasilkan penelitian sebagai berikut, pergeseran episentrum kekuasaan pasca reformasi tahun 1998 dari sentralistik ke desentralisasi memberi harapan baru kepada setiap daerah untuk membangun daerah dengan segala potensi yang dimiliki. Desentralisasi memberi legitimasi kepada setiap daerah untuk memproduksi atau menghasilkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk di bidang pariwisata. Sebagai

subordinat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki legitimasi yang sama untuk membuat berbagai kebijakan termasuk di bidang pariwisata. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan pariwisata sebagai leading sektor pembangunan dan membuat Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan sisi-sisi implementasi seperti Partisipasi, Jejaring, Struktur Keorganisasian, aktor, finansial, fasilitas, kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kepentingan stakeholder. Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya pendukung implementasi belum dialokasikan dengan jelas, komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal, kondisi eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) menghambat implementasi kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat secara efektif dan optimal. Implikasinya adalah aktivitas pariwisata berbasis kearifan lokal belum berkontribusi secara optimal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dari sisi ekonomi.

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Riswandi, STIA Sebelas April Sumedang (2017) penelitian skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang	a. Metodologi penelitian kualitatif b. Pengumpulan data c. Pengolahan data Indikasi permasalahan	a. <i>Lokus</i> penelitian b. Informan penelitian (Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan serta pegawai yang menangani air minum/air bersih.) c. Hasil penelitian
2	Wiguna, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2017) penelitian skripsi dengan judul Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Kebakaraan Kabupaten Bandung	i. Metodologi penelitian kualitatif ii. Pengumpulan data ii. Pengolahan data Indikasi permasalahan	a. <i>Lokus</i> penelitian b. Informan penelitian (Kepala Dinas Kebakaran, dan Pegawai Pemadam Kebakaran) c. Hasil penelitian
3	Maksimilianus Maris Jupir, Universitas Brawijaya Malang (2013) penelitian skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat)	a. Metodologi penelitian kualitatif b. Pengumpulan data c. Pengolahan data Indikasi permasalahan	a. <i>Lokus</i> penelitian b. Informan penelitian (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pelaksana Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal) c. Hasil penelitian

Setelah dilihat dari permasalahan yang ada pada penelitian tersebut di atas, penelitian ini masih memiliki perbedaan yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Terkait dengan implementasi kebijakan yang tentu berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, baik dari sisi pelaksana, letak wilayah atau geografis, serta karakter atau iklim dari lokasi penelitian yang akan diteliti permasalahannya.

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Banyaknya peristiwa bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang dan juga luasnya daerah di Kabupaten Sumedang dapat menjadi potensi terjadinya bencana kebakaran menjadikan Pemerintah untuk membuat kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran demi terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan nyaman.

UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan standar pelayanan minimal yang menjadi acuan atau panduan agar dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang terciptanya layanan atau respon cepat (*Response Time*) baik dalam pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran ataupun dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Tujuan dari pembentukan kebijakan Standar pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dalam hal ini yaitu penanggulangan kebakaran.
2. Standar pelayanan minimal sebagai alat bagi UPTD Pemadam Kebakaran dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar.

3. Standar pelayanan minimal dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas UPTD Pemadam Kebakaran terhadap masyarakat.
4. Dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2018

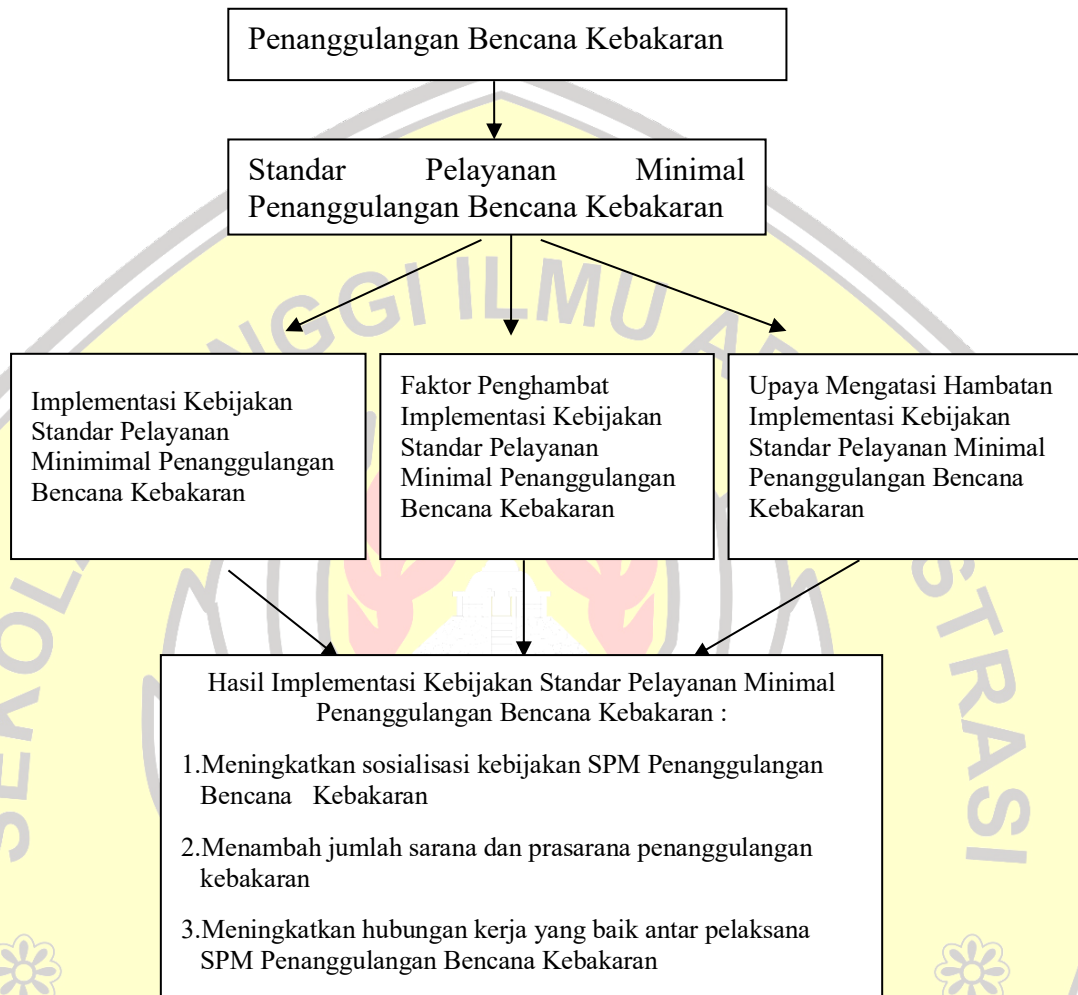
Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi
2. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satiakar, dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas terkait.

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran ini dapat dikatakan berhasil apabila mengacu pada faktor implementasi kebijakan publik. Faktor implementasi kebijakan publik tersebut yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti membuat kisi-kisi pertanyaan, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan pengamatan penelitian secara langsung pada objek penelitian

mengenai variabel penelitian yaitu Implementasi Kebijakan yang disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Kisi-Kisi Pertanyaan	No Item
Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?	Implementasi Kebijakan, George C. Edwards III dalam Mulyadi (2018: 68) : 1. Komunikasi	a. kebijakan dikomunikasikan kedalam organisasi	1
		b. kebijakan dikomunikasikan keluar organisasi	2
		c. ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan	3
		d. sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat	4
	2. Sumber Daya	a. kompetensi implementor	5
		b. sumber daya finansial	6
	3. Disposisi	a. kesamaan komitmen pelaku kebijakan	7
		b. melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh	8
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Prosedur	9
		b. Jabatan Manajerial	10
		c. Hubungan Kerja	11
		d. Garis komando	12
		e. Pembaian kerja	13

Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?	Faktor-faktor penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan, Sunggono (2016: 135-138)	a. Pemahaman Isi Kebijakan	14
		b. Manfaat Kebijakan	15
		c. Sumber Daya	16
	1. Isi Kebijakan		
	2. Informasi	a. Ketidak jelasan Informasi	17
		b. Sasaran Sosialisasi	18
	3. Dukungan	a. Penyelenggara program	19
		b. Sasaran Program	20
	4. Pembagian Potensi	a. Pembagian tugas yang jelas	21
		b. Tanggung Jawab	22
Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang?	Upaya-upaya mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan, Sunggono (2016: 135-138)		
		a. Pemahaman Isi Kebijakan	23
		b. Manfaat Kebijakan	24
	2. Informasi	c. Sumber Daya	25
		a. Ketidak jelasan Informasi	26
		b. Sasaran Sosialisasi	27
	3. Dukungan	a. Penyelenggara program	28
		b. Sasaran Program	29
	4. Pembagian Potensi	a. Pembagian tugas yang jelas	30
		b. Tanggung Jawab	31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) yaitu suatu kondisi sebagaimana adanya yang benar-benar terjadi dilapangan, peneliti tidak merekayasa dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi keilmiahannya obyek yang diteliti dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sugiyono (2017: 1) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*”.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2017: 17) sebagai berikut:

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dan responden.
3. Metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjamin pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

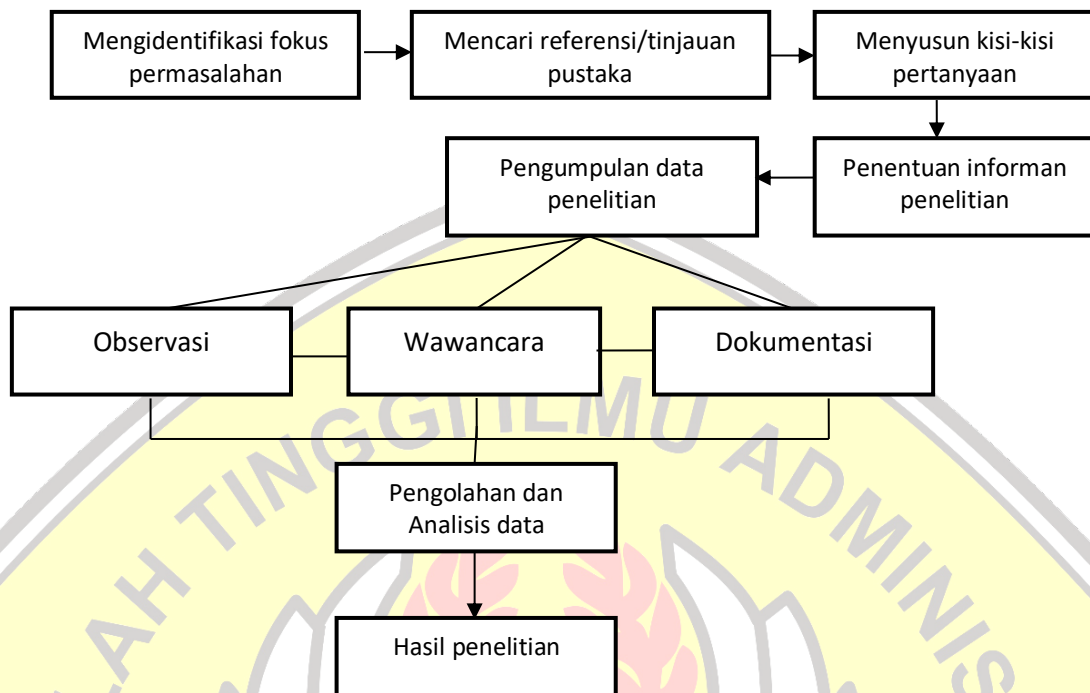
Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Moleong (2017: 8-13) mengemukakan ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (*Instrument*)
3. Metode kualitatif
4. Analisa data secara induktif
5. Teori dari dasar (*Grounded Theory*)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan bersama.

Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2012: 4) mengemukakan bahwa: “Metodologi Penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksripif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Dengan demikian, penggunaan metode yaitu kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas pada UPTD Pemadam Kebakaran wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memiliki gambar langkah desain penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1
Langkah-langkah Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Sementara itu dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradey (Sugiyono, 2017: 215) dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari atas tiga elemen, yaitu: tempat (*Place*), perilaku (*Actors*), dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Yang menjadi fokus dan lokus penelitian ini adalah Pegawai UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang yang berjumlah 31 orang.

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional Pemadaman Kebakaran	1
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelamatan dan Sarana Prasarana	1
3.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	1
4.	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	1
5.	Kasubag TU UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	1
6.	Staff Umum	1
7.	Kepala Pasukan Pemadam Kebakaran	1
8.	Ketua Regu Pemadam Kebakaran	3
9.	Pasukan Pemadam Kebakaran	21
Jumlah		31

2. Informan Penelitian

Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan argument bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi di Wilayah Sumedang Kota, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 219). Artinya yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.
- b. Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai pelaksanaan implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.
- c. Memiliki keterkaitan, baik secara individu maupun instuisi dengan pelaksanaan implemantasi kebijakan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Adapun yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan informan adalah:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	1
2.	Kepala UPTD Damkar Wilayah Sumedang Kota	1
3.	Kepala Pasukan Pemadam Kebakaran	1
4.	Ketua Regu Pemadam Kebakaran	1
5.	Pasukan Pemadam Kebakaran	1
Jumlah		5

Informan merupakan sumber data penting dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor usia dan jenjang pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Umur data pegawai

No	Jabatan	Pengelompokan		
		Umur	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin
1	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	>50 Tahun	S2	Laki-laki
2	Kepala UPTD Damkar Wilayah Sumedang Kota	>50 Tahun	S1	Laki-laki
3	Kepala Pasukan Pemadam	<50 Tahun	S1	Laki-laki

	Kebakaran			
4	Ketua Regu Pemadam Kebakaran	46-50 Tahun	D3	Laki-laki
5	Anggota Regu Pemadam Kebakaran	20-35 Tahun	SMA	Laki-laki

Sumber: Renstra UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data-data diatas, penyusun mengambil sejumlah 5 orang informan atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, diperlukan rincian data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder. Definisi data primer adalah yang langsung diamati di lapangan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan dari dokumen dan media pemberitaan resmi, serta hasil observasi peneliti di lapangan.

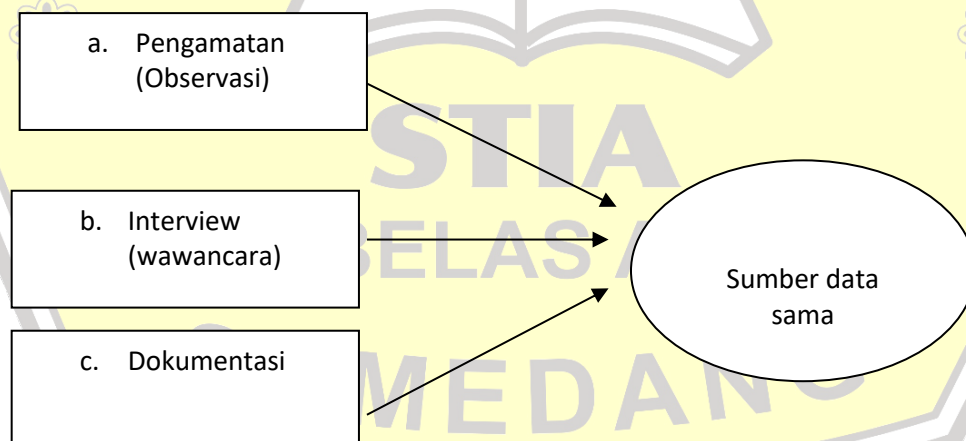
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, disusun dengan dua jenis teknik pengumpulan data yang meliputi :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data secara langsung yang biasanya bersifat teoritis dengan membaca, mempelajari buku-buku, literature, catatan-catatan, peraturan tertulis berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kajian yang diteliti yaitu Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran.
2. Studi lapangan, yaitu mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan data.
 - a. Observasi yaitu pengambilan data atau informasi dengan mengamati langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ditempat yang menjadi subjek penelitian yaitu UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.
 - b. Interview (wawancara) yaitu proses atau upaya dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui Tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten, dalam hal ini yakni para pelaksana yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang sebagai informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam, penelitian telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis

yang alternatif jawabannya telah disiapkan serta didukung dengan alat bantu seperti *handphone* yang memiliki aplikasi perekam suara.

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap data dalam observasi dan wawancara untuk penelitian kualitatif.

Proses pengumpulan data dengan mengacu kepada tiga teknik tersebut dinamakan Teknik Triangulasi yang diartikan sebagai yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan menggunakan tiga point yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3.2

Gambar Triangulasi

D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data

Dengan penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh kapan dan dimana pun pertanyaan pada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama diajukan, hasil jawaban tetap konsisten sama. Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengolahan data yang di tempat dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 246), yaitu sebagai berikut:

1. Data *reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti yaitu Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran.

2. Data *display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan cenderung bersifat naratif. Selanjutnya Sugiyono (2017 : 95) menyarankan selain dengan teks naratif, juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan/Verifikasi)

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang mantap. Kesimpulan ini akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian, metode, teori dan sumber data.

```
graph TD; DC[Data Collection] --> D[Data]; D --> DR[Data Reduction]; DR --> CDV[Conclusion Drawing/ Verification]; CDV --> DC;
```

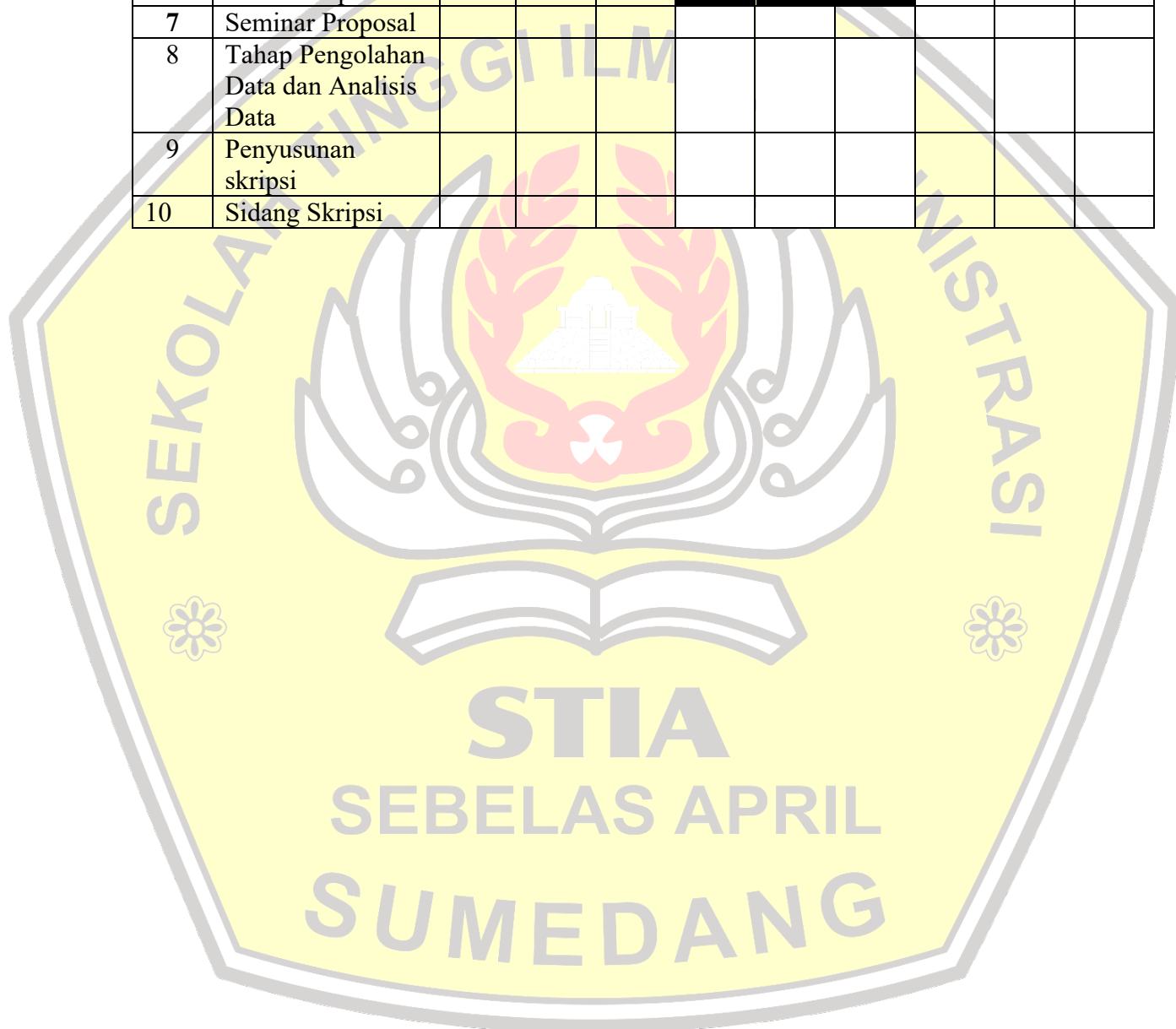
The flowchart illustrates the Data Mining Process. It begins with a box labeled "Data Collection", which leads to a box labeled "Data". From "Data", the process moves to "Data Reduction", and then to "Conclusion Drawing/ Verification". A feedback loop arrow returns from "Conclusion Drawing/ Verification" to "Data Collection", indicating an iterative process.

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

[illegible]

	Masalah									
3	Penentuan Masalah Dan Judul Penelitian									
4	Pengumpulan Data									
5	Penyusunan Proposal									
6	Revisi Proposal									
7	Seminar Proposal									
8	Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data									
9	Penyusunan skripsi									
10	Sidang Skripsi									



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV (Empat) mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor keberhasilan Implementasi secara efektif, akan tetapi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran, setiap pelaksana kebijakan sudah menjalankan komunikasi dengan cukup baik.
 - b. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh para pelaksana yang terampil yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus mengenai teknis pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran tersebut. Namun terkait dengan

fasilitas baik sarana maupun prasarana yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran ini belum sepenuhnya terpenuhi semua dengan baik.

- c. Dalam melaksanakan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran, tingkat kedisiplinan dan kejujuran pelaksana dalam menjalankan tugasnya maupun dalam melaksanakan program kebijakan yang akan dijalankan sudah cukup baik dengan adanya kerjasama dari setiap pelaksana kepada sasaran kebijakan.
- d. Dalam melaksanakan kebijakan SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran ini pihak pelaksana UPTD sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya yaitu berbentuk Permendagri. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu pada Permendagri tersebut dan harus diikuti oleh pelaksana baik dari pihak Bidang, UPTD maupun Relawan dari masyarakat.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Standar pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

- a. Hambatan yang dihadapi dalam pemahaman kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu:
 - 1) Kurangnya pemahaman sasaran kebijakan yaitu masyarakat mengenai kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- 2) Adanya keterbatasan pengetahuan setiap pelaksana, baik pasukan pemadam kebakaran maupun relawan kebakaran dari masyarakat.
- 3) Kurangnya rasa ingin tahu tentang kebijakan yang dijalankan.

Dari ketiga hambatan diatas, pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

- b. Hambatan yang dihadapi terkait dengan informasi yaitu masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas tentang kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran dan bisa mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran kurang berjalan dengan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c. Hambatan yang dihadapi pihak pelaksana dan sasaran program kebijakan yaitu terkait dengan anggaran yang masih terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
 - d. Adanya pelaksana kebijakan yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya masih ada sebagian pelaksana yang merangkap jabatannya sehingga dalam kinerjanya kurang optimal.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana

Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaksana dan masyarakat, serta memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat tentang kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran agar dalam pelaksanaan kebijakan ini pelaksana lapangan berkompeten sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu:

- 1) Dengan adanya kegiatan rutin dan berkelanjutan berupa pertemuan dan pemberian materi.
- 2) Mengadakan pelatihan khusus bagi pelaksana lapangan.

- b. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kejelasan informasi dan sasaran sosialisasi yaitu:

- 1) Pemberian informasi dilakukan se jelas mungkin.
- 2) Dibuatnya target pencapaian kegiatan sosialisasi.
- 3) Dilakukannya sosialisasi melalui media masa cetak dan elektronik.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi rutin atau berkelanjutan kepada sasaran kebijakan.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dilakukannya perencanaan yang matang dan merinci setiap kebutuhan terkait dengan program kebijakan yang akan dijalankan. Serta adanya

pendekatan kepada sektor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran terkait dengan kebutuhan setiap program kebijakan yang akan dijalankan.

- d. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu setiap petugas atau pelaksana lapangan baik pasukan kebakaran maupun relawan kebakaran harus bekerja sesuai dengan tupoksi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Selain itu juga pihak pelaksana selalu berkoordinasi dengan sektor terkait sesuai dengan bidang yang dikerjakannya agar semua tugas bisa terselesaikan dengan baik.

B. Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Harus lebih ditingkatkannya pelaksanaan sosialisasi dan harus dilakukan dalam waktu yang jelas serta berkelanjutan yang dituangkan pada kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SPM) Pemadam Kebakaran agar terealisasinya kebijakan ini dengan baik. Serta agar semua pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dan memahami seluruh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran.
2. Dilaksanakannya pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh pihak penyelenggara kepada setiap pelaksana baik pasukan kebakaran ataupun

relawan kebakran dari pihak masyarakat, agar pihak pelaksana mampu untuk melaksanakan program kebijakan ini dengan baik dan berkompeten. Sehingga tidak mengandalkan pihak Bidang untuk turut serta kegiatan dilapangan.

3. Dilaksanakannya pendekatan kepada masyarakat yang tidak mau turut serta dalam melaksanakan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran, agar masyarakat mengetahui dan merasakan hasil dari adanya kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu :
 - a. Meningkatkan nilai kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan nyaman.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya tentang penanggulangan bencana kebakaran baik pencegahan maupun pasca kebakaran.
 - c. Meningkatkan rasa kepedulian dan jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Adanya bantuan dana dari pihak sektor-sektor terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan bidang yang di kerjakannya agar program yang akan dilaksanakan bisa terealisasi dengan baik.
5. Pihak pemerintah pusat ataupun daerah harus lebih memperhatikan lagi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap UPTD Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten terutama dalam anggaran. Agar pelaksanaan

kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran bisa berjalan lebih baik lagi.

6. Pihak penyelenggara dapat membuat agenda kegiatan dengan sasaran program kebijakan yang lebih gencar lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan P. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. (2015). *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dunn, William. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwight Eisenhower. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Edward III, George C. (2015). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fiedick, (2015). *Public Policy*. Jakarta: STIE YKPN.
- Goggin, (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Handyaningrat, Soewarno. (2015). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Iskandar. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- J.Wayong, (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kaplan, Abraham, (2016). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kencana, Inu. (2015). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- LAN RI. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Mulyadi, (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Munawardi, (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A. ., Agningsih, D. P. ., Aprilianti, D. N. ., Sutisna, E. ., & Yuliani, L. . (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 49-59. Retrieved from

<https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/52>

Nugroho, (2014). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Plato (2015). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Ripley, (2017). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Siagian, (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Silalahi, Ulbert. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Steward, (2015). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suryadi. (2015). *Pengantar Stusi Ilmu Admistrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Sunggono, (2016). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, (2015). *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tangkilisan, Hessel Nogi. (2015). *Implementasi Kebijakan Public Transformasi*. Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman YPAPI.

Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja. (2016). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service)

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Dokumen-dokumen :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
3. Profil Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang.
4. Rencana Strategis Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

SOP Pencegahan dan Pemadaman Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sumedang.

